



Data Statistik Berbasis Wilayah

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan pembangunan data statistik berbasis wilayah untuk mendukung kebutuhan dalam menentukan berbagai kebijakan atau program kerja yang akan dilakukan di kota tersebut.

"Pembangunan data yang konkret dan valid sangat penting dilakukan. Bukan hanya untuk kepentingan normatif tetapi data yang disusun harus dapat dimanfaatkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan untuk menyusun kebijakan," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Hastono dikutip dari Antara di Yogyakarta, Rabu (25/1).

Menurut Tri, pembangunan data akan dilakukan berbasis wilayah dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang saat ini sudah memiliki program Desa Cipta Statistik atau Desa Cantik. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menargetkan setiap kecamatan minimal memiliki satu kelurahan yang masuk dalam program Desa Cantik.

Dengan program tersebut, maka setiap kelurahan diharapkan dapat mengkonstruksikan sumber data yang sudah dimiliki untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dimanfaatkan. "Data harus disusun sesuai kaidah statistik sehingga data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan," ujarnya.

Pada 2022, salah satu kelurahan di Kota Yogyakarta yaitu Kelurahan Gunungketur menjadi satu-satunya wakil Kota Yogyakarta dan DIY dalam program Desa Cantik. Kelurahan tersebut masuk sebagai 25 nominasi Desa Cantik tingkat nasional.

Berbagai kegiatan pembangunan data yang dilakukan kelurahan tersebut di antaranya, pembinaan dan pendampingan statistik, pelatihan statistik desa, hingga penyediaan aplikasi untuk kebutuhan data statistik Kelurahan Gunungketur juga melakukan berbagai percepatan dan penguatan data statistik yang menjadi bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuridjaya mengatakan, pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah harus didasarkan pada fakta yang terukur atau data. "Semakin berkualitas data yang tersusun, data yang tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kebijakan atau keputusan yang diambil akan tepat sesuai sasaran dan kebutuhan," ujarnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPS	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005